

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan yang tidak harmonis dengan birokrasi di Indonesia, terutama mencuat pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana birokrasi mengalami transformasi menjadi alat politik. Dampaknya adalah dengan tingginya biaya yang harus ditanggung warga. Ketidakpastian waktu, biaya, dan akuntabilitas merupakan beberapa realitas empiris dari keruntuhan birokrasi. Apalagi birokrasi merupakan salah satu penyebab adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Keterlibatan politisi memiliki peran sangat dominan dalam birokrasi pemerintahan. Keadaan ini telah membentuk sikap, perilaku, dan pandangan yang tidak dapat dibedakan oleh politisi dan pejabat (Muhammad, 2018). Fungsi tersebut melibatkan penetapan struktur organisasi dan batas yurisdiksi bagi unit-unit birokrasi, memengaruhi tujuan, strategi, dan program-program yang akan diimplementasikan oleh birokrasi, hingga memberikan persetujuan atau menolak usulan anggaran. (Wahab, 2019).

Birokrasi merupakan struktur organisasi, bagan organisasi, pembagian kerja dan hierarki dalam suatu organisasi yang mempunyai peranan penting dalam tertibnya tugas (Muhammad, 2018) misalnya dalam pemerintahan, rumah sakit, sekolah, tentara, dan lain-lain. Tugas utama birokrasi adalah mengatur dan menjamin berfungsinya pemerintahan. Birokrasi pemerintah sebagai lembaga resmi pelaksana suatu negara bertanggung jawab dalam mencapai misi dan tujuan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Menurut

Blau dan Meyer dalam Muhammad (2018) menerangkan bahwa dalam institusi yang kuat terdapat birokrasi yang dapat membuat potensial terhadap hal baik dan buruk ada sebagai alat manajemen rasional yang netral dalam jumlah besar. Selain itu, di dalam masyarakat *modern* berargumen bahwa banyak kelangsungan dan stabilitas bisnis, yang dapat mengatasi hanya organisasi birokrasi. Sistem pemerintahan justru diibaratkan sebagai aparatur sipil negara. Birokrasi juga berarti pengelolaan suatu pekerjaan secara teratur yang dilakukan banyak orang secara terus – menerus, hanya organisasi birokrasi yang dapat memenuhinya. Secara rutin suatu tugas yang dilakukan oleh banyak orang diatur dalam birokrasi (Muhammad, 2018).

Berdasarkan konsep birokrasi yang sudah dipaparkan diatas dijelaskan bahwa suatu organisasi birokrasi didirikan dan dibentuk secara formal untuk memaksimalkan efisiensi administrasi pemerintahan dan pengembangan institusi, aparatur, sistem dan prosedur yang inklusif untuk melakukan kegiatan kepentingan umum atau sosial. Organisasi ini termasuk institusi, aparatur, sistem dan prosedur, membentuk kelompok sosial tersendiri yang memiliki tujuan dan prinsip yang serupa apalagi menjadi kolektif mempunyai kekuatan dan tanggung jawab tersendiri. Oleh karena itu, penyelenggara negara perlu memiliki pedoman sikap dan perilaku, agar birokrasi menjadi bersih, dinamis, dan bertanggung jawab. Bukan hanya kewajiban formal, melainkan juga kewajiban moral.

Instansi pemerintahan dalam mendapat pegawai negeri sipil yang memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki sikap disiplin, menyadari

kewajibannya sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan fungsi aparatur sipil negara dalam konteks reformasi birokrasi, dengan tujuan meningkatkan reputasi dan kinerja lembaga pemerintah menuju profesionalisme yang lebih baik dan mendukung terciptanya pemerintahan yang efisien. Keharusan untuk menjaga disiplin sangat penting dalam upaya meningkatkan citra kerja dan produktivitas pegawai. Disiplin merupakan aspek penting dalam pengelolaan *human resources*, sehingga dapat menghasilkan karyawan yang konsisten dan tepat waktu serta dapat meningkatkan kinerjanya.

Setiap instansi dalam menilai ketaatan pegawai terhadap jadwal kehadiran dapat diidentifikasi melalui rekam jejak kehadiran di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan adopsi sistem pencatatan kehadiran untuk mengelola catatan kehadiran secara komprehensif. Penggunaan sistem kehadiran yang digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan yang diterapkan oleh suatu lembaga atau lembaga pendidikan. Ada berbagai jenis sistem absensi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi, termasuk cara manual. Namun penggunaan penunjuk waktu manual memiliki keterbatasan yang dapat memudahkan terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam penunjukan waktu, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan seperti ini perlu diatasi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan disiplin di instansi pemerintah.

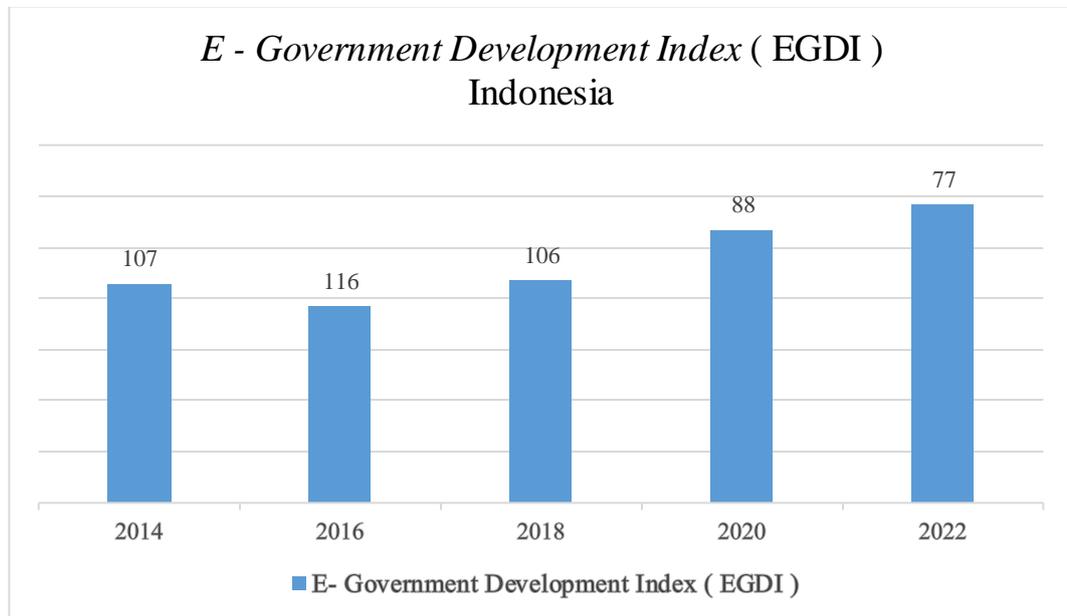
Dalam perkembangan globalisasi, teknologi menjadi salah satu kunci utama. Perkembangan teknologi tersebut bisa menjadi salah satu instrument,

adapun digunakan pemerintah demi meningkatkan kinerja menuju perbaikan yang lebih baik. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi yang dikolaborasikan dengan kebijakan publik dalam bentuk *e-government*. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang didukung oleh internet, untuk menciptakan manajemen yang efektif dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi warga negara. (Supriyanto, 2016)

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah implementasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada para pengguna SPBE. Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dianggap penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan layanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Tujuan utama Perpres ini adalah mendorong penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE agar berhasil sesuai dengan kebutuhan yang relevan dan mendukung penggunaan SPBE secara efisien. (Kementerian Sekretariat Negara, 2018).

Dari hasil *United Nations E – Government 2022* dalam Kominfo (2022) menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke – 77 dalam hal pengembangan dan implementasi *E – Government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan peringkat dibandingkan dengan hasil survei di tahun 2020, sebagaimana data di bawah ini :

**Grafik 1. 1 Survei *E-Government* Persatuan Bangsa – Bangsa ( PBB ) tahun 2022.**



Sumber : Kominfo 2022

Perkembangan teknologi melalui *E – Govenment* menjadikan pemerintah dapat membangun platform absensi *online* dapat mengurangi pelanggaran disiplin pegawai dan meningkatkan kejujuran dalam melaporkan kehadiran pegawai, Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2021, peraturan tersebut memberikan panduan terkait penggunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan *E-Government*, meningkatkan tingkat keterbukaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara yang efisien dan ekonomis. Melalui penerapan sistem absensi *online*, diharapkan dapat memungkinkan pemantauan terhadap tingkat kedisiplinan karyawan dalam menjalankan tugas mereka.

Pemanfaatan teknologi pada organisasi pemerintahan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan efisiensi operasional. Miller, dalam Tangkilisan (2005:138), menguraikan bahwa efisiensi merujuk pada sejauh mana suatu sistem sosial dapat mencapai hasil yang bermanfaat. Penerapan sistem penunjuk waktu *online* perlu meningkatkan disiplin PNS tentang ketepatan waktu. Kondisi di Indonesia saat ini menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan para pejabat. Dengan adanya sistem partisipasi *online* diharapkan terjadi perubahan positif pada struktur birokrasi Indonesia, dengan harapan perkembangan teknologi yang terus berkembang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif. Memang pemanfaatan teknologi presensi *online* dipandang sebagai solusi yang bisa membantu pemerintah dalam ketepatan pencatatan jam kerja pegawai, termasuk waktu kedatangan dan kepulangannya. Selain itu, laporan ketepatan waktu yang akurat sangat penting untuk memberikan gaji yang tepat bagi karyawan. Hal ini dapat mengurangi potensi kerugian yang mungkin ditanggung pemerintah akibat kesalahan pembayaran remunerasi kepada pejabat publik. Selain itu, adanya mekanisme sanksi berupa pengurangan tunjangan sesuai tingkat keterlambatan juga dapat mendorong pegawai dalam hal disiplin dalam bekerja, sehingga terhindar dari pelanggaran disiplin.

Penelitian Fitria (2020) yang berjudul *Penerapan Work From Home Dan Work From Office Dengan Absensi Online Sebagai Implikasi E-Government Di Masa New Normal* menyebutkan bahwa Dengan ada penerapan *E-Government* melalui absensi *online*, memiliki aspek negatif dan positif

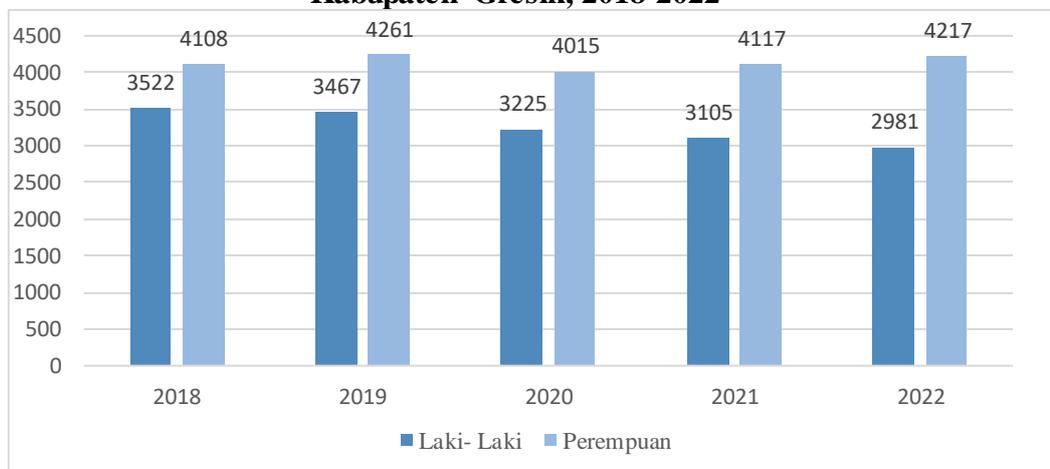
dengan keunggulan dan kelemahan. Kedua hal tersebut dapat diselesaikan melalui berbagai tindakan, upaya penanaman kebiasaan yang baik, serta pengawasan yang tepat. Intinya, penggunaan absensi *online* bertujuan untuk memudahkan pegawai dalam mencatat kehadiran, termasuk mereka yang bekerja dari rumah (WFH) dan di kantor (WFO), serta untuk menjaga agar pegawai tidak absen tanpa izin, tidak berkeluyuran, dan tetap menjalankan tugasnya selama jam kerja. Melalui penerapan ini, absensi sekarang dicatat bersamaan dengan pelaksanaan tugas. Sistem ini telah diterapkan di beberapa lembaga, contohnya Dinas Dukcapil (Pendudukan dan Catatan Sipil) di Jawa Timur yang menggunakan mesin terbaru yang disebut Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Hal serupa juga terjadi di Kota Probolinggo dengan diterapkannya sistem baru yang dinamakan "Berkas Pelayanan Jalan Sendiri (BPJS Bangkit)" serta beberapa inovasi lainnya.

Selanjutnya dalam penelitian Fahrani et al. (2022) yang berjudul Inovasi *E-Government* Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang menyebutkan bahwa Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP) Aplikasi Absensi *Online* berfungsi untuk memudahkan ketepatan waktu ketika ASN/PNS berada jauh dari kantor dinas. Adanya pengembangan SIAP yaitu partisipasi *e-Government* berdasarkan pada digital dinilai sudah baik karena mampu mengurangi angka ketidakhadiran yang sering terjadi. Dalam pelaksanaannya, proses ini menjadi lebih cepat karena hanya memerlukan tindakan selfie, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam lingkup birokrasi. Bertanggung jawab dalam

penerapan SIAP, perangkat masih kurang familiar dengan keberadaan aplikasi dalam bentuk ini, situasinya perangkat harus mengambil foto diri sendiri. Perlu dicatat bahwa aplikasi ini baru diluncurkan pada tahun 2019 dan hanya ada beberapa lembaga pemerintah di Kabupaten Karawang.

Penerapan aplikasi absensi *online* saat ini semakin umum digunakan oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk contohnya Dinas Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah Pegawai Negeri di lingkup Pemerintahan Daerah Kab Gresik pada tahun 2022 sebanyak 7.198 orang. Dengan perbandingan antara pegawai laki – laki dan wanita sebesar 41,41% dan 58,59 % (Satriyo Wibowo et al., 2023)

**Grafik 1. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dari Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik, 2018-2022**



Sumber: gresikkab.co.id 2022

Berdasarkan perangkat dan pangkat kepemilikannya, perangkat dan pangkat pejabat pada departemen/lembaga di wilayah Pemerintahan Kabupaten Gresik mayoritas berada pada golongan III yaitu sebanyak 3.915 manusia. Disusul kelas IV sebanyak 1.804 orang.

**Tabel 1. 1 Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Berdasarkan Jumlah Pegawai Sipil di Kabupaten Gresik, Desember 2022**

Pangkat/Golongan		2022		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah total
<b>Golongan I</b>		<b>41</b>	<b>6</b>	<b>47</b>
1. I/A	Juru Muda	-	-	-
2. I/B	Juru Muda Tingkat 1	1	-	1
3. I/C	Juru	3	-	3
4. I/D	Juru Tingkat 1	37	6	43
<b>Golongan II</b>		<b>706</b>	<b>726</b>	<b>139</b>
5. II/A	Pengatur Muda	31	3	34
6. II/B	Pengatur Muda Tingkat I	116	23	139
7. II/C	Pengatur	137	349	486
8. II/D	Pengatur Tingkat I	442	351	773
<b>Golongan III</b>		<b>1471</b>	<b>2444</b>	<b>3915</b>
9. III/A	Penata Muda	503	849	1352
10. III/B	Penata Muda Tingkat I	241	464	705
11. III/C	Penata	229	446	675
12. III/D	Penata Tingkat I	498	685	1183
<b>Golongan IV</b>		<b>763</b>	<b>1041</b>	<b>1804</b>
13. IV/A	Pembina	359	463	822
14. IV/B	Pembina Tingkat I	354	507	861
15. IV/C	Pembina Utama Muda	44	68	112
16. IV/D	Pembina Utama Madya	6	3	9
17. IV/E	Pembina Utama	-	-	-
<b>Jumlah/Total</b>		<b>2981</b>	<b>4217</b>	<b>7198</b>

Sumber: gresikkab.co.id, 2022

Sistem absensi tenaga kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kabupaten Gresik dahulu menggunakan sistem absensi *fingerprint*. Sistem absensi *fingerprint* mewajibkan pegawai untuk melakukan absensi di tempat kerja sehingga kurang efektif apabila terdapat pegawai yang sedang bertugas di luar tempat kerja. *Fingerprint* sendiri merupakan teknologi biometrik yang memungkinkan terekamnya corak sidik jari, yang selanjutnya disimpan untuk keperluan identifikasi. Sidik jari tersebut akan dicocokkan dengan kode sidik jari yang telah diidentifikasi dan disimpan sebelumnya dalam basis data (Setiawan Putra & Fauzjiah, 2018). Secara sederhananya, sidik jari beroperasi dengan cara “mengambil gambar” sidik jari individu, kemudian menyimpan pola uniknya identifikasi dilakukan dengan membandingkan data yang tersimpan. Jika dianggap sama, akses akan terbuka secara otomatis. Kelemahan lain dari penggunaan mesin sidik jari adalah adanya kesalahan yang sering terjadi dalam proses identifikasi yang salah atau bahkan ketidakmampuan mengidentifikasi sidik jari sama sekali.

Maka pada aplikasi absensi *online* adalah absensi yang dengan mudah mencatat aktifitas kehadiran serta waktu pegawai pada saat ia melakukan absensi. Pegawai pun hanya perlu untuk mengunduh aplikasi tersebut untuk menghubungkan sistem dari perusahaan ke *smartphone* mereka. Berkat popularitas *smartphone* android yang meluas, beberapa perusahaan kini memiliki kesempatan untuk memodernisasi sistem mereka dengan menggunakan perangkat ini. Hal ini disebabkan oleh kemudahan

penggunaannya dan kemampuannya untuk melakukan absensi dari berbagai lokasi, menghemat waktu yang sebelumnya terbuang.

Penggunaan *smartphone* android sangatlah sederhana dan hampir semua orang memilikinya. Mulai dari kelas ekonomi menengah hingga atas, dari generasi muda hingga orang dewasa, banyak yang memiliki ponsel pintar (*smartphone*). Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang ditawarkan oleh *smartphone* android jika digunakan untuk tujuan positif (Patresia et al., 2022). Maka dari itu, *smartphone* android menjadi pilihan utama untuk mempermudah tugas – tugas individu. Hal yang sama berlaku untuk sistem absensi, yang memerlukan pembaruan yang efisien agar karyawan dapat mencatat kehadiran dengan cepat tanpa perlu menunggu dalam antrean, pilihan terbaik adalah menggunakan *smartphone* android untuk tujuan ini. Sistem absensi seperti ini juga dapat mengoptimalkan waktu kerja di perusahaan, menghindari pegawai dari antrian untuk menandatangani formulir atau menggunakan alat *fingerprint*. Semua ini merupakan pemborosan waktu dalam pekerjaan. Oleh karena itu, penggunaan *smartphone* android sangat penting dalam memodernisasi sistem absensi.

Permasalahan dalam penggunaan aplikasi absensi digital untuk meningkatkan tata tertib pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (OPD) dalam penerapan absensi *online*, pemerintah masih menghadapi beberapa kendala seperti penggunaan *fake Global Positioning System* (GPS), cara ini membantu untuk memanipulasi lokasi ponsel, banyak aplikasi lokasi GPS palsu yang beredar di *playstore*. Pegawai dapat

menggunakan aplikasi atau metode palsu untuk menunjukkan lokasi yang berbeda saat mereka seharusnya melakukan absensi. Hal ini dapat merusak integritas data absensi dan merugikan kepercayaan dalam sistem tersebut. Beberapa ASN Pemerintahan Bupati Gresik juga menggunakannya, namun ketahuan atau dilaporkan oleh seseorang, seperti yang dilakukan anggota Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Bupati Gresik di kawasan Bunder. Pegawai dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gresik terlibat dalam tindakan manipulasi absensi. OPD yang terlibat meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Parekrabudpora), Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perikanan (radargresik.id).

Sebagaimana yang dilansir dari kanal berita kabargresik.com sebagai berikut:

**GRESIK** – “*fake GPS* pernah digunakan oleh salah satu ASN di sana tapi sudah kami proses.” ujar Khusaini, kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia Pemkab Gresik, Jumat (13/1/2023) di kantornya”.

Sumber:<https://www.kabargresik.com/bongkar-cara-culas-presensi-asn-kab-gresik/>.diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat dari kenyataan bahwa aplikasi absensi *online* ini belum mencapai tingkat kinerja yang diinginkan, hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa aplikasi ini baru diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Juli 2022. Penggunaan *fake GPS* bisa mengganggu kinerja secara signifikan. Pegawai atau peserta yang tidak mengikuti peraturan absensi dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan ketidaksetaraan di tempat kerja atau lembaga terkait.

Ketertiban sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di suatu organisasi. Tingkat kedisiplinan yang tinggi mencerminkan sejauh mana seseorang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Ini merangsang semangat dan motivasi kerja, serta membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, kedisiplinan pegawai menjadi fondasi utama yang perlu ditanamkan dan dijaga untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan (Haryanti, 2019). Kedisiplinan dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi krusial karena membentuk dasar yang kokoh untuk menjaga tata kelola dan kinerja organisasi. Tingkat kedisiplinan yang tinggi mencerminkan komitmen ASN terhadap tugas dan tanggung jawabnya, memperkuat integritas, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pelayanan publik. Dengan menjaga kedisiplinan, ASN dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung visi dan misi pemerintah serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan bertanggung jawab.

Pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Gresik aplikasi *prestige* adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan absensi *online*, dengan basis data dari *system* kepegawaian Kabupaten Gresik, dan mengimplementasikan peraturan terkait. Di masa sekarang, ketika tuntutan akan fleksibilitas dan kemudahan dalam bekerja semakin meningkat, penting sekali untuk menerapkan teknologi dalam aspek pekerjaan yang paling fundamental, dalam hal ini objek Dinas Pemerintahan Kabupaten Gresik adalah absensi ([prestige.gresikkab.go.id](http://prestige.gresikkab.go.id)).

Dalam konteks unit Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, penerapan kehadiran melalui Aplikasi Prestige dimulai sejak Agustus 2022 dan masih berlaku hingga saat ini, yang mana setiap pegawai harus mendaftarkan kehadirannya di jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Untuk jam kerja Satpol PP Gresik, waktu *check-in* pukul 07.30 dan waktu *check-out* pukul 16.00. karena ada cukup banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Sejauh ini, pegawai ASN berjumlah 251 orang dengan jumlah pegawai sebanyak 121 orang, sedangkan pegawai non-PNS (kontrak) berjumlah 130 orang pegawai.

Penggunaan sistem pencatatan waktu *online* akan meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan waktu, mengingat kondisi Indonesia saat ini mencerminkan rendahnya tingkat kedisiplinan PNS. Sebagaimana yang dilansir dari kanal berita kumparan.com sebagai berikut :

“Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi sepanjang tahun 2019 berada pada kisaran “rendah”. Meski ada provinsi yang “moderat”, namun hanya 3 yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sisanya sebanyak 31 provinsi di Indonesia berada pada kelompok lemah/sangat lemah.”  
Sumber: <https://kumparan.com/bryan-jure-pelawi/menilik-profesionalitas-pegawai-aparatur-sipi-l-negara-di-indonesia-1vzB81jSp9J/full/>. diakses pada 16 Januari 2023

Dengan diadopsinya absensi *online* diharapkan akan membawa perbaikan pada birokrasi Indonesia, sehingga timbul keinginan untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin luas untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif. Pemanfaatan teknologi presensi *online* disebut mampu meningkatkan keakuratan pencatatan kehadiran pegawai baik yang masuk maupun keluar, serta memungkinkan pemerintah menetapkan upah

yang sesuai bagi mereka yang perlu bekerja. Diharapkan bahwa dengan adanya catatan kehadiran yang akurat, potensi kerugian akibat pemberian kompensasi yang tidak semestinya kepada pegawai negeri dapat berkurang. Selain itu, hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada pegawai untuk menghormati jam kerja melalui penerapan sanksi berupa pemotongan kompensasi yang sesuai dengan keterlambatan yang terjadi.

Pengaplikasian absensi *online* di lingkungan Satpol PP Gresik mempertimbangkan beberapa indikator efektivitas keterbatasan yang dihadapi, yaitu kemampuan adaptasi dan kepuasan. Penggunaan sistem absensi online dimulai dari pengaduan aparatur sipil negara. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sempat mengalami kendala, di mana petugas mengeluhkan kesulitan beradaptasi saat sistem absensi pertama kali diterapkan secara daring. Salah satu alasan utamanya adalah mereka tidak memahami cara menggunakannya. Ada kalanya juga aplikasi sering menghasilkan *error*. Pada bulan April 2023, oknum ASN melakukan aksi curang hadir melalui aplikasi absensi Prestige Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Kabupaten Gresik (BKSPDM). Atas dasar itu, peralihan sistem penunjukan waktu *online* berdampak pada menurunnya kepuasan kerja dan produktivitas kerja aparatur sipil negara. Dalam konteks ini, Penulis bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penggunaan sistem absensi *online* dan dampaknya terhadap tingkat kedisiplinan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Inilah yang mendorong penelusuran dengan judul: “Efektivitas Penerapan Sistem Absensi

*Online* dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas  
Satpol PP Kabupaten Gresik”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat terbentuk permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Sistem Absensi *Online* untuk Meningkatkan Kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan sistem absensi *online* dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur sipil negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, serta sebagai peninjauan dampak penerapan absensi *online* pada ASN di Satpol PP Kabupaten Gresik

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi peneliti

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana dalam program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

### 2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPN “Veteran” Jawa Timur

Untuk melengkapi referensi pustaka yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian bagi studi sejenis di Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jawa Timur.

### 3. Bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ide – ide konstruktif untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. Selain itu,

diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat di masa depan.